



Website:

ejournal.umm.ac.id/index.php/jaa

Afiliasi:

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Brawijaya, Malang,
Indonesia

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Airlangga, Surabaya,
Indonesia

***Correspondence:**

widyacitap@student.ub.ac.id

DOI: [10.22219/jaa.v7i2.31579](https://doi.org/10.22219/jaa.v7i2.31579)

Sitasi:

Pramesti, W, C., & Laili, T, F.
(2024). Peran Moderasi Koneksi
Politik Dalam Pengaruh
Multinasionalitas Terhadap
Penghindaran Pajak. Jurnal
Akademi Akuntansi, 7(2), 200-210.

Proses Artikel

Diajukan:

05 Januari 2024

Direviu:

06 Januari 2024

Direvisi:

19 Januari 2024

Diterima:

26 Januari 2024

Diterbitkan:

28 Mei 2024

Alamat Kantor:

Jurusan Akuntansi
Universitas
Muhammadiyah Malang
Gedung Kuliah Bersama 2
Lantai 3.
Jalan Raya Tlogomas 246,
Malang, Jawa Timur,
Indonesia

Tipe Artikel: Paper Penelitian

PERAN MODERASI KONEKSI POLITIK DALAM PENGARUH MULTINASIONALITAS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Widya Cita Pramesti^{1*}, Tasyahadul Fadlatil Laili²

ABSTRACT

Purpose: Tax avoidance is still commonly practiced by multinational corporations. The upper echelon theory considers top management as the most important strategic decision-maker and has a direct impact on organizational results, so it is suspected that political connections will affect tax avoidance by companies. This research aims to examine the moderating role of political connections in moderating the influence of multinationality on tax avoidance.

Methodology/approach: This research uses a quantitative approach with a positivism paradigm. The sample for this research was chosen using the purposive sampling method. The sample in this research was 84 manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2019-2021 period. The data analysis technique used is Moderated Regression Analysis (MRA) with Stata 15 software.

Findings: The research results show that multinationality has a positive effect on tax avoidance and political connections weaken the relationship between multinationality and tax avoidance.

Practical and Theoretical Contribution/Originality: This research is expected to provide information for the Directorate General of Taxation as a reference to assess the tax avoidance behavior conducted by multinational companies in order to prevent fraud in taxation practices. Additionally, this research can contribute to the upper echelon theory in understanding the political connections that can moderate the relationship between multinationality and tax avoidance.

Research Limitation: The use of a common tax avoidance measurement, namely the Effective Tax Rate (ETR). ETR only reflects the final result of tax avoidance, which can also be influenced by other factors such as regulations or the company's financial condition.

KEYWORDS: Multinationality; Political Connection; Tax Avoidance; Upper Echelon Theory.

ABSTRAK

Tujuan penelitian: Penghindaran pajak merupakan penghindaran yang masih kerap dilakukan oleh perusahaan multinasional. Dalam perspektif teori eselon atas menganggap manajemen puncak sebagai pembuat keputusan strategis yang paling utama dan memiliki dampak langsung terhadap hasil organisasi, sehingga diduga dengan adanya koneksi politik akan mempengaruhi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji



peran moderasi koneksi politik dalam memoderasi pengaruh multinasionalitas terhadap penghindaran pajak.

Metode/Pendekatan: Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan paradigma positivisme. Pengambilan sampel penelitian ini dipilih menggunakan metode purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah 84 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2021. Teknik analisis data yang digunakan adalah Moderated Regression Analysis (MRA) dengan software Stata 15.

Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa multinasionalitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dan koneksi politik memperlemah hubungan antara multinasionalitas terhadap penghindaran pajak.

Kontribusi Praktik dan Teoretis/Orisinalitas: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi Direktorat Jenderal Pajak sebagai acuan untuk menilai perilaku penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan multinasional agar dapat mencegah kecurangan dalam praktik perpajakan. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada teori eselon atas dalam memahami koneksi politik yang dapat memoderasi hubungan multinasionalitas terhadap penghindaran pajak.

Keterbatasan Penelitian: Penggunaan pengukuran penghindaran pajak yang umum, yaitu Effective Tax Rate (ETR). ETR hanya mencerminkan hasil akhir dari penghindaran pajak, yang juga dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti regulasi atau kondisi keuangan perusahaan.

KATA KUNCI: Koneksi Politik; Multinasionalitas; Penghindaran Pajak; Teori Eselon Atas.

PENDAHULUAN

Penghindaran pajak merupakan penghindaran yang masih dipandang etis dan legal karena tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan ([Sutrisno et al., 2022](#)). [Hanlon & Heitzman \(2010\)](#) menyatakan bahwa tindakan penghindaran pajak merupakan salah satu bentuk efisiensi pajak dan memberikan beberapa manfaat, seperti peningkatan arus kas dan kesejahteraan investor. Namun, konsekuensi lainnya adalah pembayaran denda dan penalti yang menyebabkan penurunan arus kas dan kesejahteraan investor.

Tindakan penghindaran pajak dapat terjadi melalui praktik *income shifting*. *Income shifting* merupakan teknik perencanaan pajak yang mentransfer pendapatan dari wajib pajak di negara dengan tarif tinggi ke negara dengan tarif rendah ([Richardson & Taylor, 2015](#)). *Tax Justice Network* melaporkan bahwa Indonesia diperkirakan mengalami kerugian hingga US\$4,86 miliar setara dengan Rp68,7 triliun dengan kurs rupiah tahun 2020 sebesar Rp14.149 per dollar Amerika Serikat. Dalam laporan *The State of Tax Justice 2020* menyatakan bahwa dari kerugian tersebut, sebanyak US\$78,83 juta dari wajib pajak orang pribadi. Tindakan penghindaran pajak tersebut melibatkan perusahaan multinasional untuk mengalihkan labanya ke negara surga pajak dengan tujuan agar tidak melaporkan besar keuntungan di negara tempat berbisnis sehingga perusahaan membayar pajak terutang lebih sedikit

(Kontan.co.id, 2020). Fenomena penghindaran pajak di Indonesia membuat tarif PPh badan semakin menurun yang awalnya 25% menjadi 22% dan memungkinkan akan terus menjadi penurunan. Bahkan, pengamat pajak *Center for Indonesia Taxation Analysis* Fajry Akbar mengatakan bahwa kebijakan *alternative minimum tax* perlu diterapkan di Indonesia sebab banyak terjadi penghindaran perpajakan terutama pada perusahaan multinasional yang masih banyak ditemukan mengalami kerugian secara terus-menerus namun masih tetap beroperasi, hal tersebut merupakan indikasi dari tindakan penghindaran pajak secara agresif (Kompas.com, 2021).

Dalam perspektif teori eselon atas, teori ini menganggap manajemen puncak sebagai pembuat keputusan strategis yang paling utama dan memiliki dampak langsung terhadap hasil organisasi. Teori eselon atas dapat dipengaruhi oleh pengalaman, kepribadian, pendidikan, kondisi ekonomi, pendidikan, dan karakteristik dari para manajemen ([Hambrick & Mason, 1984](#)). Pimpinan perusahaan yang memiliki latar belakang sosial dan karakteristik kelompok yang terkoneksi politik akan lebih berani dalam mengambil keputusan yang memiliki risiko lebih besar, sehingga nantinya perusahaan akan cenderung melakukan tindakan penghindaran pajak dengan tujuan keuntungan perusahaan ([Hidayati & Diyanty, 2018](#)).

Praktik *income shifting* akan menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah multinasionalitas, dimana perusahaan beroperasi secara multinasional atau lintas negara di luar pasar domestik ke negara-negara asing ([Hennart, 2011](#)). Hal ini memberikan keuntungan dan celah bagi perusahaan untuk melakukan aktivitas bisnis barang atau jasa di beberapa negara. Perusahaan juga mendapat kesempatan investasi yang lebih luas daripada jika hanya beroperasi secara lokal. Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan untuk menguji pengaruh multinasionalitas terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh [Falbo & Firmansyah \(2021\)](#) menunjukkan hasil bahwa *multinationality* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang mempunyai hubungan bisnis lintas negara umumnya mempunyai *prestige* dan *brand image* yang baik, maka tindakan penghindaran pajak dianggap berisiko dan dapat merusak reputasi, serta perusahaan multinasional seringkali mendapatkan insentif pajak dari pemerintah untuk mendorong ekspor dan penghasilannya kembali ke dalam negeri. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh [Taylor & Richardson \(2012\)](#) yang menunjukkan bahwa *multinationality* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Transaksi yang melibatkan beberapa negara memberikan peluang bagi perusahaan multinasional untuk memaksimalkan peluang *tax avoidance* dengan tarif pajak yang rendah dan kelemahan peraturan perpajakan yang ada untuk meminimalkan beban pajaknya. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh [Zia et al. \(2018\)](#) menunjukkan bahwa *multinationality* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Pada dasarnya, Besar atau kecilnya jumlah anak perusahaan di berbagai negara tidak mempengaruhi perilaku perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak karena jika dilihat dari anak perusahaan yang berada di luar negeri memiliki tarif pajak yang sama atau tidak terlalu berbeda sehingga perusahaan cenderung tidak melakukan penghindaran pajak.

Salah satu faktor yang diprediksi berpengaruh terhadap praktik *income shifting* diprediksi adalah adanya koneksi politik. Perusahaan yang dikategorikan memiliki koneksi politik diyakini dapat membantu mengurangi risiko bisnis dan memberikan manfaat di pasar ([Hidayati & Diyanty, 2018](#)). Menurut [Sudibyo & Jianfu \(2016\)](#), penghindaran pajak yang terkoneksi politik akan lebih besar jika perusahaan memiliki aktivitas luar negeri sebagai perusahaan multinasional (MNC). Selain itu, perusahaan yang melakukan transaksi luar negeri akan cenderung mencari perlindungan dari koneksi politiknya termasuk dalam hal melakukan tindakan penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh [Putra & Suhardianto \(2020\)](#) menunjukkan hasil bahwa koneksi politik memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran

pajak. Hal ini berarti koneksi politik meningkatkan pembayaran pajak atau cenderung menghindari tindakan penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh [Yudanto & Damayanti \(2022\)](#) yang menyatakan bahwa hubungan politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dengan koneksi politik akan mendapatkan perlindungan lebih dari pemerintah. Proteksi yang berlebihan akan membuat perusahaan merasa lebih aman melakukan aktivitas yang berisiko seperti penghindaran pajak.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini menarik untuk dilakukan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada penggunaan landasan teori yaitu menggunakan landasan teori eselon atas, teori yang menganggap manajemen puncak sebagai pembuat keputusan yang paling utama dalam organisasi pada konteks penghindaran pajak internasional karena dikaitkan dengan variabel koneksi politik. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menutupi *research gap* adanya ketidakkonsistenan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya mengenai faktor yang mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak melalui praktik *income shifting* yaitu multinasionalitas. Dalam penelitian ini, koneksi politik dijadikan sebagai variabel moderasi untuk memperkuat atau memperlemah hubungan dari multinasionalitas terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, maka judul dalam penelitian ini adalah “Pengaruh Multinasionalitas Terhadap Penghindaran Pajak dengan Koneksi Politik Sebagai Variabel Moderasi”.

Multinasionalitas Terhadap Penghindaran Pajak

Multinasional merupakan perusahaan multinasional yang memiliki anak perusahaan guna beroperasi antar negara. Perusahaan multinasional (MNC) adalah perusahaan yang menjalankan usaha dan berlokasi dalam dua negara atau lebih dalam rangka memperluas jaringan bisnisnya ([Hennart, 2011](#)). Perusahaan dengan keunggulan geografis dan memiliki perusahaan yang beroperasi lebih dari satu negara memungkinkan perusahaan tersebut untuk melakukan tindakan penghindaran pajak dengan mudah.

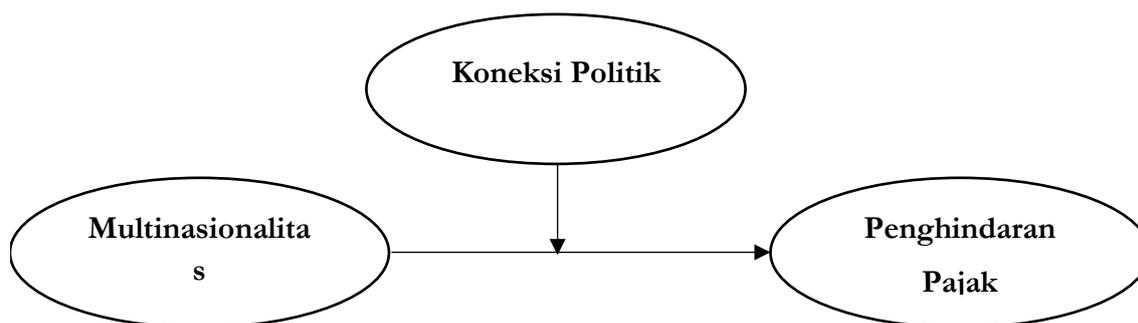
Penelitian yang dilakukan oleh [Taylor & Richardson \(2012\)](#) menunjukkan bahwa *multinationality* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Mekanisme harga transfer yang dilakukan oleh perusahaan multinasional untuk menentukan harga yang wajar untuk transaksi antar anak perusahaan atau entitas dalam kelompok perusahaan yang beroperasi di berbagai negara, sehingga transaksi yang melibatkan beberapa negara memberikan peluang bagi perusahaan multinasional untuk memaksimalkan peluang *tax avoidance* dengan tarif pajak yang rendah dan kelemahan peraturan perpajakan yang ada untuk meminimalkan beban pajaknya. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H₁: Multinasionalitas Berpengaruh Positif Terhadap Penghindaran Pajak

Koneksi Politik Memoderasi Multinasionalitas Terhadap Penghindaran Pajak

Koneksi politik merupakan kondisi dimana terjalin hubungan antara pihak tertentu dengan pihak yang memiliki kepentingan politik untuk mencapai hal yang dapat menguntungkan kedua belah pihak ([North, 1990](#)). Menurut [Sudibyo & Jianfu \(2016\)](#), penghindaran pajak yang terkoneksi politik akan lebih besar jika perusahaan memiliki aktivitas luar negeri sebagai perusahaan multinasional (MNC). Selain itu, perusahaan yang melakukan transaksi luar negeri akan cenderung mencari perlindungan dari koneksi politiknya termasuk dalam hal melakukan tindakan penghindaran pajak.

Gambar 1.
Kerangka
Konsep
Penelitian



Koneksi politik yang dimiliki membuat perusahaan memperoleh perlakuan khusus, seperti kemudahan dalam memperoleh pinjaman modal, risiko pemeriksaan pajak rendah yang membuat perusahaan semakin agresif dalam menerapkan *tax planning* yang berakibat pada penurunan transparansi laporan keuangan. Menurut teori eselon atas yang dikembangkan oleh [Hambrick & Mason \(1984\)](#) merupakan teori yang menganggap manajemen puncak sebagai pembuat keputusan strategis yang paling utama dan memiliki dampak langsung terhadap hasil organisasi. Dalam hal ini, perusahaan dengan koneksi politik akan mendapatkan perlindungan lebih dari pemerintah, termasuk aktivitas yang berisiko seperti penghindaran pajak. Tarif pajak yang berbeda-beda di tiap negara menjadi indikasi bahwa kemungkinan perusahaan memanfaatkan multinasionalitas untuk menurunkan beban pajaknya melalui perlindungan pemerintah yang terkoneksi politik. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H₂: Koneksi Politik Memperkuat Hubungan Antara Multinasionalitas Terhadap Penghindaran Pajak

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan paradigma positivisme untuk mengidentifikasi pengaruh multinasionalitas terhadap penghindaran pajak dengan koneksi politik sebagai variabel moderasi menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan dan laporan keuangan yang diperoleh dari *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan *website* perusahaan sampel. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021. Pemilihan perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia dipilih karena masih rawan dan memiliki trend penghindaran pajak yang tinggi, seperti seperti PT. Bentoel Internasional, PT Nestle, Coca Cola Company, dan banyak perusahaan manufaktur lainnya. Selain itu karakteristik perusahaan manufaktur juga dianggap sesuai dengan variabel penelitian ini yaitu sering melakukan mekanisme harga transfer serta banyak beroperasi secara multinasional. Selanjutnya, sampel penelitian ini dipilih menggunakan metode *purposive sampling* dengan beberapa kriteria (Lihat Tabel 2).

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini mengkaji tentang penghindaran pajak sebagai variabel dependen, lalu multinasionalitas sebagai variabel independen, dan koneksi politik sebagai variabel moderasi. Berikut adalah definisi operasional setiap variabel pada penelitian ini:

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pengujian *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan *software* Stata 15 sebagai alat analisis data. Tahapan analisis data antara lain, uji data melalui model regresi, analisis deskriptif, dan uji hipotesis. Model analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 (X_1 * Z) + \varepsilon$$

Variabel	Definisi	Indikator
Penghindaran Pajak	Upaya oleh wajib pajak untuk meminimalkan besarnya pajak terutang yang tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan (Firmansyah & Muliana, 2018).	$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$
Multinasionalitas	Ekspansi suatu perusahaan di luar pasar domestik ke negara-negara lain (Hennart, 2011).	$\text{Foreign Ratio} = \frac{\text{Total Foreign Sales}}{\text{Total Global Sales}}$
Koneksi Politik	Kondisi dimana terjalin hubungan antara pihak tertentu dengan pihak yang memiliki kepentingan politik untuk mencapai hal yang dapat menguntungkan kedua belah pihak (North, 1990).	Pengukuran menggunakan <i>dummy</i> dengan memberikan nilai 1 untuk perusahaan yang memenuhi salah satu indikator yaitu pemegang saham besar mengendalikan setidaknya 10% suara, dewan direksi atau komisaris yang merupakan anggota parlemen saat ini atau mantan anggota parlemen, menteri atau kepala pemerintahan, memiliki hubungan dekat dengan seorang politisi; dan memberikan nilai 0 jika tidak memenuhi.

Tabel 1.
Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan. Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021. Sampel penelitian ini dipilih menggunakan metode *purposive sampling* dengan beberapa kriteria yang dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah ini. Dari kriteria yang ditentukan, sebanyak 28 perusahaan yang memenuhi kriteria sehingga terdapat 84 observasi dalam penelitian ini.

No.	Keterangan	Total
1.	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021	181
2.	Perusahaan manufaktur yang tidak menerbitkan laporan tahunan dan laporan keuangan lengkap selama tahun 2019-2021	(25)
3.	Perusahaan dengan laba negatif	(55)
4.	Perusahaan yang tidak termasuk <i>Multinational Corporate</i> (MNC)	(56)
5.	Perusahaan manufaktur yang tidak menyajikan data yang berkaitan dengan variabel yang dibutuhkan	(17)
	Jumlah Sampel Perusahaan	28
	Jumlah Pengamatan (Jumlah Sampel x 3 Tahun)	84

Tabel 2.
Kriteria Pemilihan Sampel

Tabel 3.
Hasil Statistik
Deskriptif

Variabel	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
ETR	84	.2190292	.2546286	.0001329	.9771763
Multi	84	.281831	.3111954	.0001316	.9953843

Analisis Data dan Hipotesis

Dari tabel 3 diatas dapat dilihat bahwa nilai *mean* dari variabel ETR (Penghindaran Pajak) yaitu sebesar 0,21 atau kurang dari tarif pajak yang berlaku, karena tarif pajak yang berlaku di Indonesia pada tahun 2019 sebesar 25% dan pada tahun 2020 hingga 2021 tarifnya sebesar 22%. Nilai tersebut menunjukkan nilai persentase pajak yang dibayar oleh perusahaan, hal ini mengindikasikan bahwa adanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian nilai *minimum* dari variabel ETR adalah 0,0001329 dimiliki oleh Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk tahun 2020, sedangkan nilai *maximum* sebesar 0,977 pada perusahaan Alakasa Industrindo Tbk tahun 2019.

Sementara nilai *mean* dari variabel Multinasionalitas sebesar 0,281831 yang menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan dalam sampel memiliki tingkat keterlibatan internasional sebesar 28.18%. Ini menunjukkan bahwa sekitar 28.18% dari aktivitas bisnis perusahaan-perusahaan dalam sampel dilakukan di luar negeri. Kemudian nilai *minimum* yaitu 0,0001316 pada Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk tahun 2020, sedangkan nilai *maximum* sebesar 0,995 pada perusahaan Alakasa Industrindo Tbk tahun 2021.

Pada Tabel 4 menunjukkan lebih banyak perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik dari pada perusahaan yang memiliki koneksi politik. Jumlah perusahaan dalam sampel yang terindikasi koneksi politik sebanyak 39,29% dari total 84 observasi, sedangkan 60,71% dari sampel tidak memiliki koneksi politik.

Tabel 4.
Statistik
Deskriptif
Koneksi
Politik

Keterangan	Frekuensi	%
Koneksi Politik	33	39,29%
Non Koneksi Politik	51	60,71%
Total	84	100

Tabel 5.
Hasil Uji R2
dan Uji f

Number of obs	=	84
F (3, 80)	=	25.96
Prob > F	=	0.0000
R-squared	=	0.4933
Adj R-squared	=	0.4743
Root MSE	=	.18461

ETR	Coef.	Std. Err.	t	p> t
Koneksi Politik	.0217688	.0550187	0.40	0.693
Multi	.6466332	.0814269	7.94	0.000
Moderasi	-.321563	.1373562	-2.34	0.022
_cons	.0580968	.0362018	1.60	0.112

Tabel 6.
Moderated
Regression
Analysis Test
Result

Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Nilai *adjusted R-squared* yang terdapat pada Tabel 5 yaitu sebesar 0.4743 atau 47,43%. Nilai tersebut dapat menggambarkan tentang sejauh mana variabel independen dan moderasi menjelaskan variasi dalam variabel dependen dengan mempertimbangkan kompleksitas model. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel multinasionalitas dan variabel koneksi politik 47,43% dapat menjelaskan variabel penghindaran pajak. Sementara sebesar 52,57% dijelaskan oleh variabel lain diluar dari model penelitian ini.

Uji Simultan (Uji f)

Pada Tabel 5 dapat dilihat bahwa nilai probabilitasnya adalah 0,0000 atau mendekati angka 0 yang mana menunjukkan adanya bukti yang signifikan untuk menolak H₀. Maka variabel multinasionalitas dan koneksi politik berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak.

Uji Parsial (Uji t)

Dapat dibuktikan pada Tabel 6 terkait dengan pengaruh variabel, dimana multinasionalitas memiliki pengaruh signifikan. Hal ini juga menunjukkan arah hubungan positif dengan nilai t sebesar 7.94, sehingga dapat disimpulkan bahwa multinasionalitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak atau **H₁ diterima**.

Berdasarkan uji t yang dapat dilihat pada Tabel 6 juga menunjukkan bahwa secara parsial variabel koneksi politik memoderasi hubungan multinasionalitas terhadap penghindaran pajak, namun karena nilai t sebesar -2.34 sehingga koneksi politik justru memperlemah pengaruh multinasionalitas terhadap penghindaran pajak atau **H₂ ditolak**.

Pengaruh Multinasionalitas Terhadap Penghindaran Pajak

Multinasionalitas merujuk pada perusahaan yang mengembangkan operasinya di luar pasar domestiknya ke negara-negara asing. Perusahaan multinasional menikmati berbagai manfaat, termasuk memanfaatkan mekanisme *transfer pricing*, *income shifting*, keuntungan struktur modal dan memanfaatkan perbedaan tarif pajak di berbagai negara untuk kepentingan perpajakan. Dari penelitian ini dapat dibuktikan bahwa perusahaan multinasionalitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak dan luas operasi luar negeri sebuah perusahaan, semakin mudah bagi perusahaan untuk mengelola struktur keuangannya. Dengan kata lain, perusahaan multinasional dengan banyak operasi di luar negeri melakukan transaksi yang lebih kompleks, sehingga lebih sulit untuk mendeteksi bahwa perusahaan tersebut telah menghindari pajak. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh [Falbo & Firmansyah \(2021\)](#), [Ferdawan & Firmansyah \(2017\)](#), [Kudil et al. \(2022\)](#). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [Hanlon &](#)

[Heitzman \(2010\)](#), [Otusanya \(2011\)](#), [Richardson & Taylor \(2015\)](#) yang menunjukkan bahwa multinasionalitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan cenderung memanfaatkan aktivitas luar negeri, yang umumnya dilakukan oleh afiliasi mereka di luar negeri dengan tarif pajak yang lebih rendah. Hal ini bertujuan untuk meringankan beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

Koneksi Politik Memoderasi Multinasionalitas Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa koneksi politik mampu memoderasi hubungan antara multinasionalitas terhadap penghindaran pajak yang. Namun adanya koneksi politik justru memperlemah pengaruh positif multinasionalitas terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dengan koneksi politik cenderung menghindari praktik penghindaran pajak atau dengan kata lain koneksi politik akan meningkatkan jumlah pajak yang dibayarkan kepada negara. Temuan ini tidak dapat membuktikan teori eselon atas yang diduga dengan adanya pemimpin perusahaan yang memiliki koneksi dapat meningkatkan multinasionalitas terhadap penghindaran pajak. Pemimpin perusahaan yang memiliki koneksi politik mungkin memiliki cara berfikir yang lebih berfokus pada kepatuhan terhadap regulasi, hubungan baik dengan pemerintah, dan tanggung jawab sosial. Adanya pemimpin yang memiliki karakteristik dengan tegas cenderung setia kepada pemerintah dan perusahaan yang akhirnya akan patuh pada pembayaran pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [Iswari et al. \(2019\)](#) dan [Putra & Suhardianto \(2020\)](#) dimana keberadaan manajemen yang memiliki koneksi politik dapat menekan aktivitas penghindaran pajak. Perusahaan yang terhubung dengan koneksi politik cenderung ingin menjaga reputasi dan legitimasi karena jika terlibat dalam praktik penghindaran pajak yang terlalu agresif dapat memicu kontroversi dan merusak citra perusahaan di mata publik. Meskipun perusahaan multinasional cenderung terlibat dalam praktik penghindaran pajak, kehadiran koneksi politik dapat mengurangi dampak negatif tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa variabel multinasionalitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan multinasional dengan banyak operasi di luar negeri akan melakukan transaksi yang lebih kompleks, sehingga lebih sulit untuk mendeteksi bahwa perusahaan tersebut telah menghindari pajak. Selanjutnya, koneksi politik mampu memoderasi hubungan antara multinasionalitas terhadap penghindaran pajak. Namun, adanya koneksi politik justru memperlemah pengaruh positif multinasionalitas terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dengan koneksi politik akan meningkatkan jumlah pajak yang dibayarkan kepada negara. Perusahaan yang terhubung dengan koneksi politik cenderung ingin menjaga reputasi dan legitimasi mereka.

Batasan dari penelitian ini terletak pada penggunaan ukuran penghindaran pajak yang umum, yaitu Effective Tax Rate (ETR). ETR hanya memperhitungkan jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dibandingkan dengan pendapatan yang diakui. Namun dalam kenyataannya, penghindaran pajak memiliki beragam bentuk yang meliputi tindakan sederhana seperti menaikkan biaya yang diperbolehkan fiskal untuk mengurangi laba, manipulasi laba, atau melakukan transaksi yang kompleks. ETR hanya mencerminkan hasil akhir dari penghindaran pajak, yang juga dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti regulasi atau kondisi keuangan perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan pada penelitian ini, maka saran-saran yang dapat diberikan antara lain, bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat menggunakan objek penelitian pada jenis perusahaan lain selain perusahaan manufaktur yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia serta menambahkan periode tahun penelitian sehingga dapat dilakukan perbandingan; Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan atau menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak agar dapat menjelaskan sebagian besar variabel dependen; selain itu, peneliti selanjutnya dapat menggunakan proksi lain dari variabel yang digunakan peneliti, seperti proksi penghindaran pajak dapat menggunakan Cash Effective Tax Rate (CETR), Current Effective Tax Rate, dan Book Tax Differences.

DAFTAR PUSTAKA

- Falbo, T. D., & Firmansyah, A. (2021). Penghindaran Pajak di Indonesia: Multinationality dan Manajemen Laba. *Bisnis Net: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 94–110. <https://doi.org/10.46576/bn.v4i1.1325>
- Ferdiawan, Y., & Firmansyah, A. (2017). Pengaruh Political Connection, Foreign Activity, dan Real Earnings Management Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 5(3), 1601–1624. <https://doi.org/10.17509/jrak.v5i3.9223>
- Firmansyah, A., & Muliana, R. (2018). The Effect of Tax Avoidance and Tax Risk on Corporate Risk. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 22(4), 643–656. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i4.2237>
- Hambrick, D. C., & Mason, P. A. (1984). Upper Echelons: The Organization as a Reflection of Its Top Managers. *The Academy of Management Review*, 9(2), 193–206. <https://doi.org/10.2307/258434>
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A Review of Tax Research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2), 127–178. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Hennart, J.-F. (2011). A Theoretical Assessment of The Empirical Literature on The Impact of Multinationality on Performance. *Global Strategy Journal*, 1(1–2), 135–151. <https://doi.org/10.1002/gsj.8>
- Hidayati, W., & Diyanty, V. (2018). Pengaruh Moderasi Koneksi Politik Terhadap Kepemilikan Keluarga dan Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 22(1), 46–60. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol22.iss1.art5>
- Iswari, P., Sudaryono, E., & Widarjo, W. (2019). Political Connection and Tax Aggressiveness: A Study on The State-Owned Enterprises Registered in Indonesia Stock Exchange. *Journal of International Studies*, 12, 79–92. <https://doi.org/10.14254/2071-8330.2019/12-1/5>
- Kompas.com. (2021). *Sri Mulyani Usulkan Pajak Minimum untuk Perusahaan yang Rugi*. <https://money.kompas.com/read/2021/06/03/054500526/sri-mulyani-usulkan-pajak-minimum-untuk-perusahaan-yang-rugi>
- Kontan.co.id. (2020). *Penghindaran pajak membuat rugi negara Rp 68,7 triliun, ini kata Dirjen Pajak*. <https://newssetup.kontan.co.id/news/penghindaran-pajak-membuat-rugi-negara-rp-687-triliun-ini-kata-dirjen-pajak>
- Kudil, A. I., Adri Satriawan Surya, R., & Wahyuni, N. (2022). Pengaruh Aktivitas Asing, Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak dengan Koneksi Politik sebagai Variabel Moderasi. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi*, 6(1), 1–27. <https://doi.org/10.35837/subs.v6i1.1607>
- North, D. C. (1990). A Transaction Cost Theory of Politics. *Journal of Theoretical Politics*, 2(4),

355–367. <https://doi.org/10.1177/0951692890002004001>

- Otusanya, O. J. (2011). The Role of Multinational Companies in Tax Evasion and Tax Avoidance: The Case of Nigeria. *Critical Perspectives on Accounting*, 22(3), 316–332. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2010.10.005>
- Putra, Z. K. P., & Suhardianto, N. (2020). The Influence of Political Connection on Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 22(2), 82–90. <https://doi.org/10.9744/jak.22.2.82-90>
- Richardson, G., & Taylor, G. (2015). Income Shifting Incentives and Tax Haven Utilization: Evidence from Multinational U.S. Firms. *The International Journal of Accounting*, 22(7), 28. <https://doi.org/10.1016/j.intacc.2015.10.001>
- Sudibyo, Y. A., & Jianfu, S. (2016). Political Connections, State Owned Enterprises and Tax Avoidance: An Evidence from Indonesia. *Corporate Ownership and Control*, 13(3), 279–283. <https://doi.org/10.22495/cocv13i3c2p2>
- Sutrisno, P., Utama, S., Anitawati Hermawan, A., & Fatima, E. (2022). Founder and Descendant vs. Professional CEO: Does CEO Overconfidence Affect Tax Avoidance in the Indonesia Case? *Economies*, 10(12), 1–20. <https://doi.org/10.3390/economies10120327>
- Taylor, G., & Richardson, G. (2012). International Corporate Tax Avoidance Practices: Evidence from Australian Firms. *International Journal of Accounting*, 47(4), 469–496. <https://doi.org/10.1016/j.intacc.2012.10.004>
- Yudanto, L. A., & Damayanti, T. W. (2022). Political Connection, Foreign Ownership, and Tax Avoidance: Does Executive Gender Moderate the Relationship? *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 24(3), 440. <https://doi.org/10.14414/jebav.v24i3.2899>
- Zia, I. K., Pratomo, D., & Kurnia. (2018). Kepemilikan Institusional dan Multinationality dengan Firm Size dan Leverage Sebagai Variabel Kontrol Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 10(2), 67–73. <https://doi.org/10.23969/jrak.v10i2.1369>